



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 11973-11981

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Ketahanan Gizi Pelajar di Indonesia

Muhamad Iqbal Wibisono, Sedya Santosa\*

Program Studi Manajemen Pendidikan Islams, Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga

[muhamad171001@gmail.com](mailto:muhamad171001@gmail.com), [sedya.santosa@uin-suk.ac.id](mailto:sedya.santosa@uin-suk.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan gizi pelajar di Indonesia. Fokus penelitian meliputi identifikasi mekanisme pelaksanaan program, tantangan operasional yang dihadapi dalam implementasi di lapangan, serta efektivitas program dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui literature review terhadap dokumen kebijakan nasional, artikel jurnal akademik, serta laporan resmi pemerintah dan lembaga terkait yang relevan dengan program MBG. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber guna memastikan konsistensi, kredibilitas, dan akurasi temuan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program MBG dirancang dengan mekanisme implementasi yang relatif sistematis melalui tiga skema penyaluran yang bersifat fleksibel dan adaptif, serta melibatkan koordinasi multistakeholder, termasuk pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, serta mitra penyedia pangan. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti disparitas infrastruktur antarwilayah, ketimpangan kapasitas kelembagaan, serta permasalahan terkait kualitas dan keamanan pangan. Secara potensial, Program MBG berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting, peningkatan kehadiran siswa di sekolah, serta perbaikan capaian akademik, sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal. Implikasi penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring dan evaluasi keamanan pangan, peningkatan investasi infrastruktur di daerah tertinggal, serta pengembangan model implementasi yang adaptif berbasis konteks lokal guna memaksimalkan efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

*Kata kunci:* Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Gizi, Stunting, Implementasi Kebijakan, Program Sekolah

### 1. Latar Belakang

Ketahanan pangan dan gizi merupakan pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh dunia (Nasional, 2019). Secara global, program pemberian makan di sekolah telah menjangkau sekitar 388 juta anak di berbagai negara, dengan cakupan terbesar berada di India, Brasil, dan Tiongkok yang masing-masing melayani puluhan juta siswa. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi sekolah, prestasi akademik, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Di Indonesia, permasalahan gizi pada anak usia sekolah masih menjadi tantangan serius yang menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 19,8 persen atau setara dengan 4.482.340 balita (Apriliyanti et al., 2025), meskipun angka ini menurun 1,7 persen dari tahun 2023 kementerian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan, Indonesia masih memerlukan intervensi yang lebih masif dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan gizi kronis yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan produktivitas generasi mendatang.

Merespons urgensi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dilaksanakan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Aisyah, 2025). Program ini ditargetkan untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/ sederajat di semua wilayah kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025 yang menasar sekitar 19,47 juta orang kementerian (Rahmah et al., 2025). Program MBG dirancang dengan tiga skema penyaluran utama, yaitu penyediaan makanan langsung di sekolah, pemberian voucher makanan, dan distribusi bahan makanan untuk dimasak di rumah, dengan fokus pada pemanfaatan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Implementasi program ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah gizi dan stunting

(Lendra, I Wayan, Daud, 2025), tetapi juga meningkatkan kehadiran siswa, konsentrasi belajar, serta memberikan dampak ekonomi berganda (multiplier effect) bagi masyarakat lokal.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia memerlukan kajian mendalam mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, petani, UMKM, transportasi, hingga ahli gizi yang harus berkoordinasi secara efektif (Basit & Ramadani, 2025). Badan Gizi Nasional sebagai koordinator pelaksana telah membangun 85 satuan pelayanan yang akan melayani sekitar 3.000 anak sekolah penerima makan gratis di setiap satuan, dengan sistem yang lebih lengkap dari dapur umum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, program ini menghadapi berbagai tantangan (Wulandari et al., 2025) seperti distribusi yang tidak merata terutama di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur, perbedaan kapasitas kelembagaan antardaerah, serta keragaman preferensi makanan lokal yang perlu diakomodasi. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai kualitas dan keamanan pangan menyusul laporan kasus keracunan makanan di beberapa wilayah, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih komprehensif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari program makan bergizi gratis di Indonesia. Penelitian (Merlinda & Yusuf, 2025) dalam studi berjudul "Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah: Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan" menemukan bahwa program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan siswa, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM serta meningkatkan motivasi belajar siswa setelah kebutuhan gizi terpenuhi. Sementara itu, penelitian (Qomarrullah, 2025) yang berjudul "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan" menyimpulkan bahwa program MBG memiliki potensi untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak sekolah, meningkatkan kehadiran siswa di kelas, dan meningkatkan prestasi akademik dalam jangka panjang.

Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak positif program MBG, namun masih terdapat keterbatasan dalam cakupan analisisnya. Penelitian (Amril & Sazali, 2025) mengidentifikasi bahwa masih terdapat masalah dalam koordinasi antarinstansi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, sementara penelitian (Fatimah et al., 2024) yang berjudul "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan" menyoroti tantangan khusus di wilayah timur Indonesia seperti keterbatasan akses distribusi pangan dan resistensi budaya terhadap menu makanan tertentu. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek dampak sosial-ekonomi, motivasi belajar, atau tantangan implementasi secara parsial, namun belum menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi program MBG secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan gizi pelajar dengan mempertimbangkan aspek kebijakan, mekanisme pelaksanaan, dan tantangan multidimensi yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam pemahaman mengenai implementasi program MBG secara holistik. Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara khusus menganalisis bagaimana mekanisme implementasi program MBG berjalan di tingkat operasional, bagaimana koordinasi antarstakeholder dilakukan, serta sejauh mana program ini efektif dalam meningkatkan ketahanan gizi pelajar di Indonesia dengan mempertimbangkan keberagaman konteks geografis dan sosial-ekonomi. Evaluasi mengenai kesesuaian antara desain kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, termasuk tantangan dalam penjaminan kualitas dan keamanan pangan, ketersediaan infrastruktur, serta keberlanjutan pendanaan juga belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi program MBG dalam konteks ketahanan gizi pelajar dengan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai dimensi kebijakan, operasional, dan dampak program.

Berdasarkan kesenjangan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam meningkatkan ketahanan gizi pelajar di Indonesia?, (2) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan?, (3) Bagaimana efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan pelajar di Indonesia?, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis mekanisme implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam konteks peningkatan ketahanan gizi pelajar di Indonesia, (2) Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di berbagai wilayah, (3) Mengevaluasi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan pelajar.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review (Ridwan et al., 2021) atau kajian pustaka untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam meningkatkan ketahanan gizi pelajar di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait program MBG, laporan resmi dari Badan Gizi Nasional dan Kementerian terkait, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional mengenai program pemberian makan di sekolah, hasil penelitian terdahulu yang mengkaji aspek implementasi dan dampak program makan bergizi, serta publikasi media massa yang memberikan informasi aktual mengenai pelaksanaan program di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pencarian literatur dengan kata kunci spesifik seperti "Program Makan Bergizi Gratis", "ketahanan gizi pelajar", "school feeding program", "stunting Indonesia", dan "implementasi kebijakan gizi" pada berbagai basis data akademik dan portal resmi pemerintah. Seluruh sumber literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kekinian informasi (Mas'odi et al., 2024) dengan memprioritaskan publikasi dari tahun 2020 hingga 2025 untuk memastikan data yang digunakan mencerminkan kondisi terkini, meskipun tidak menutup kemungkinan penggunaan literatur klasik yang memiliki nilai teoretis fundamental.

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai jenis literatur yang berbeda, baik dokumen resmi pemerintah, jurnal akademik, maupun laporan independen untuk memastikan konsistensi dan akurasi data yang dianalisis (Dewi & SH, 2025). Proses validasi data juga dilakukan melalui cross-checking informasi antarsumber untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau kontradiksi dalam temuan yang kemudian dianalisis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (contentanalysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis (Ahmad, 2018), di mana data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian yaitu mekanisme implementasi program, tantangan dan hambatan pelaksanaan, efektivitas program terhadap status gizi pelajar, serta pola koordinasi antarstakeholder. Selanjutnya, data diinterpretasikan secara mendalam dengan mengaitkan temuan empiris dari berbagai literatur dengan kerangka teoretis kebijakan publik dan ketahanan pangan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi perbaikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Mekanisme Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Ketahanan Gizi Pelajar di Indonesia

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dirancang melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai tahapan strategis untuk memastikan tercapainya tujuan peningkatan ketahanan gizi pelajar secara nasional. Berdasarkan dokumen kebijakan resmi, program ini dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional yang berfungsi sebagai leading sector dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program di seluruh wilayah Indonesia. Mekanisme awal dimulai dengan tahap perencanaan yang komprehensif, di mana pemerintah pusat menetapkan target penerima manfaat sebanyak 19,47 juta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mulai PAUD hingga SMA/ sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 (Rahmah et al., 2025). Proses perencanaan ini melibatkan pemetaan kebutuhan gizi di setiap wilayah berdasarkan data prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, dan aksesibilitas layanan pendidikan untuk memastikan prioritas sasaran program tepat pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Merlinda & Yusuf, 2025) yang menekankan bahwa perencanaan program makan bergizi tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas termasuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasokan makanan.

Dalam tahap pelaksanaan, Program MBG menerapkan tiga skema penyaluran utama yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kapasitas kelembagaan di masing-masing daerah. Skema pertama adalah penyediaan makanan langsung di sekolah melalui satuan pelayanan yang telah dibangun oleh Badan Gizi Nasional, di mana terdapat 85 satuan pelayanan yang masing-masing melayani sekitar 3.000 anak penerima program (Oktawila et al., 2025). Skema ini mengadopsi sistem yang lebih terorganisir dibandingkan dapur umum konvensional dengan standar operasional prosedur yang ketat (Suci Puteri Maulia, 2025) meliputi pemilihan bahan makanan berkualitas, proses pengolahan yang higienis, distribusi tepat waktu, dan pemantauan konsumsi oleh siswa. Skema kedua berupa pemberian voucher makanan yang memungkinkan siswa atau orang tua memilih menu makanan bergizi dari warung atau rumah makan yang telah bermitra dengan program, memberikan fleksibilitas sekaligus

mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dalam ekosistem program (Natalia Desiani, 2025). Skema ketiga adalah distribusi bahan makanan mentah untuk diolah di rumah, yang lebih relevan diterapkan di daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pelayanan makanan siap saji. Mekanisme multiskema ini menunjukkan adaptabilitas program terhadap keragaman konteks lokal, sebuah pendekatan yang didukung oleh studi (Fatimah et al., 2024) yang mengidentifikasi pentingnya penyesuaian model implementasi dengan karakteristik geografis dan sosial budaya masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan aksesibilitas dan preferensi pangan lokal yang berbeda.

Koordinasi antarstakeholder menjadi tulang punggung keberhasilan mekanisme implementasi Program MBG, mengingat kompleksitas jaringan kerja yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, petani, UMKM, distributor, dan tenaga ahli gizi (Rosidin et al., 2025). Badan Gizi Nasional berperan sebagai koordinator utama yang menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah melalui pembentukan satuan tugas (task force) di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas operasionalisasi program. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyesuaian menu makanan dengan ketersediaan pangan lokal, pemilihan mitra penyedia makanan, serta pengawasan kualitas dan keamanan pangan di wilayahnya (Sutrisno, 2022). Sekolah sebagai titik layanan terakhir berperan dalam pendataan siswa penerima, pengawasan distribusi makanan, dan pelaporan pelaksanaan program kepada satuan tugas daerah. Keterlibatan petani dan UMKM lokal diprioritaskan dalam pengadaan bahan pangan untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat, sebuah strategi yang menurut (Merlinda & Yusuf, 2025) tidak hanya menyelesaikan masalah gizi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif di tingkat akar rumput. Namun, (Amril & Sazali, 2025) mengidentifikasi bahwa masih terdapat permasalahan dalam koordinasi antarinstansi terutama terkait dengan sinkronisasi data penerima manfaat, ketepatan waktu pencairan anggaran, dan mekanisme pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Mekanisme monitoring dan evaluasi program dirancang secara berjenjang untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan. Pada tingkat operasional, dilakukan pemantauan harian oleh petugas gizi di setiap satuan pelayanan atau sekolah yang mencatat kehadiran siswa penerima, kualitas makanan yang disajikan, dan respons siswa terhadap menu makanan (Alamsyah, 2022). Data ini kemudian dikirimkan secara berkala kepada satuan tugas daerah untuk dievaluasi dan dijadikan dasar penyesuaian operasional. Pada tingkat strategis, Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi triwulanan (Fauzie Rahman et al., 2024) dan tahunan terhadap pencapaian indikator kinerja program seperti cakupan penerima manfaat, penurunan angka stunting, peningkatan kehadiran siswa, dan dampak ekonomi terhadap UMKM lokal. Sistem evaluasi ini juga melibatkan survei kepuasan penerima manfaat dan kajian dampak yang dilakukan oleh lembaga penelitian independen untuk memastikan objektivitas penilaian. Penelitian (Qomarrullah, 2025) menegaskan pentingnya mekanisme evaluasi yang komprehensif dalam mengukur dampak jangka panjang program terhadap penurunan stunting, peningkatan kehadiran siswa, dan prestasi akademik, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi landasan perbaikan kebijakan yang berbasis bukti.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme implementasi Program MBG, dapat disimpulkan bahwa program ini telah dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi stakeholder, hingga monitoring dan evaluasi. Keunggulan utama mekanisme ini terletak pada fleksibilitas skema penyaluran yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, keterlibatan multistakeholder yang menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta sistem evaluasi berjenjang yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarstakeholder dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem integrasi data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program di seluruh lini pelaksanaan untuk memastikan mekanisme yang telah dirancang dapat berjalan optimal di lapangan.

### **Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Lapangan**

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan menghadapi berbagai tantangan struktural yang bersumber dari disparitas geografis dan ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Indonesia. Distribusi makanan bergizi ke wilayah terpencil, daerah kepulauan, dan kawasan perbatasan menjadi hambatan utama yang menghambat pemerataan akses program, terutama di provinsi-provinsi Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (Setyowati, 2025). Keterbatasan infrastruktur jalan, minimnya transportasi publik, dan kondisi geografis yang sulit menyebabkan biaya logistik menjadi sangat tinggi dan waktu distribusi menjadi tidak efisien, yang pada akhirnya berisiko menurunkan kualitas dan kesegaran bahan makanan yang sampai ke tangan penerima. Penelitian (Fatimah et al., 2024) secara eksplisit mengidentifikasi bahwa tantangan distribusi pangan di Indonesia Timur tidak hanya bersifat logistik tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan bahan pangan lokal yang memenuhi standar gizi, sehingga sebagian besar pasokan harus didatangkan dari luar daerah dengan

biaya tambahan yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas penyimpanan yang memadai di daerah-daerah tersebut, di mana fasilitas cold storage dan gudang penyimpanan makanan masih sangat terbatas (Dieu et al., 2023) sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan akibat kerusakan bahan makanan sebelum didistribusikan. Lebih lanjut, infrastruktur dapur (Ximenes, 2025) dan peralatan memasak di sekolah-sekolah, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, masih jauh dari standar yang diperlukan untuk mengolah makanan dalam jumlah besar dengan mempertahankan kualitas gizi dan keamanan pangan.

Tantangan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan krusial lainnya dalam operasionalisasi program di tingkat daerah (Setyowati, 2025; Alderman & Bundy, 2012). Perbedaan kapasitas kelembagaan antara pemerintah daerah di wilayah perkotaan dan pedesaan menciptakan kesenjangan dalam kualitas pelaksanaan program, di mana daerah dengan kapasitas administratif dan manajerial yang rendah mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan, pengadaan bahan makanan, koordinasi dengan stakeholder, dan pelaporan kinerja program (Soekarjo et al., 2018; Setiawan et al., 2022). Keterbatasan tenaga ahli gizi yang tersertifikasi di daerah-daerah tertentu menyebabkan penyusunan menu makanan tidak selalu berdasarkan pada standar kebutuhan gizi yang tepat untuk anak usia sekolah (Santoso et al., 2025), sehingga risiko ketidaksesuaian antara makanan yang disediakan dengan kebutuhan nutrisi penerima menjadi lebih tinggi. (Amril & Sazali, 2025) menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dan koordinasi yang lemah antarinstansi pemerintah di tingkat lokal menjadi faktor penghambat signifikan dalam pelaksanaan program, terutama ketika tidak ada mekanisme komunikasi yang efektif antara Badan Gizi Nasional, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terlibat. Permasalahan ini semakin kompleks ketika terjadi tumpang tindih kewenangan atau ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai instansi pelaksana, yang berujung pada inefisiensi anggaran dan lambatnya respon terhadap permasalahan operasional yang muncul di lapangan.

Kualitas dan keamanan pangan menjadi tantangan kritis yang memerlukan perhatian serius dalam pelaksanaan Program MBG, terutama setelah munculnya beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah wilayah implementasi program (Bundy et al., 2018; Ababio et al., 2016). Standarisasi kualitas makanan yang disediakan masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi penerapan, di mana perbedaan kapasitas dan komitmen penyedia makanan (Zsidisin & Ritchie, 2009) baik dari kalangan UMKM maupun katering menyebabkan variasi kualitas yang signifikan antarsatu lokasi dengan lokasi lainnya. Proses pengawasan mutu dan keamanan pangan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, 2022) dan Dinas Kesehatan belum menjangkau seluruh titik penyediaan makanan program secara optimal, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan jumlah petugas pengawas. Penelitian terdahulu belum secara mendalam mengkaji aspek keamanan pangan dalam konteks program makan sekolah skala masif seperti MBG, namun pengalaman dari kasus-kasus keracunan makanan yang terjadi menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas penyedia makanan dalam menerapkan prinsip-prinsip higiene dan sanitasi pangan (Hidajah et al., 2021). Selain itu, masih terdapat keraguan mengenai kemampuan sistem pemantauan yang ada untuk mendeteksi secara dini potensi kontaminasi atau penurunan kualitas makanan sebelum dikonsumsi oleh siswa (Lestari, 2020), yang mengindikasikan perlunya investasi dalam pengembangan sistem traceability dan quality assurance yang lebih canggih.

Dimensi sosial budaya dan preferensi pangan lokal menjadi tantangan tersendiri yang mempengaruhi tingkat penerimaan dan keberlanjutan program di berbagai wilayah (Fauziah & Krianto, 2022). Keragaman etnis dan budaya di Indonesia menghasilkan perbedaan preferensi makanan yang sangat bervariasi (Hardiansyah et al., 2017), di mana menu makanan yang diterima dengan baik di satu daerah belum tentu sesuai dengan selera atau kebiasaan makan masyarakat di daerah lain. (Fatimah et al., 2024) mengidentifikasi adanya resistensi budaya terhadap menu makanan tertentu di Indonesia Timur, di mana masyarakat memiliki preferensi kuat terhadap makanan berbasis sagu, ikan, dan umbi-umbian yang berbeda dengan pola konsumsi makanan di wilayah lain Indonesia. Ketidaksesuaian menu dengan preferensi lokal tidak hanya menurunkan tingkat konsumsi makanan oleh siswa tetapi juga dapat menimbulkan pemborosan karena makanan yang disediakan tidak habis dikonsumsi (Dina, 2024). Lebih jauh, tantangan dalam mengakomodasi kebutuhan diet khusus untuk siswa dengan kondisi kesehatan tertentu seperti alergi makanan, intoleransi laktosa, atau kebutuhan diet berbasis agama menambah kompleksitas dalam penyusunan menu yang inklusif (Hardiansyah et al., 2017). Dimensi sosiologis lainnya adalah stigma sosial yang mungkin muncul di kalangan siswa penerima program, terutama di daerah perkotaan di mana perbedaan status ekonomi lebih terlihat, sehingga diperlukan strategi komunikasi dan sosialisasi yang sensitif untuk memastikan program tidak menciptakan diskriminasi atau marginalisasi terhadap siswa dari keluarga kurang mampu (Amril & Sazali, 2025).

Keberlanjutan pendanaan dan efisiensi alokasi anggaran menjadi tantangan strategis yang menentukan kelangsungan program dalam jangka panjang (Haryanto, 2017). Meskipun pemerintah telah mengalokasikan

anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025, pertanyaan mengenai kemampuan fiskal negara untuk mempertahankan alokasi anggaran sebesar ini dalam jangka panjang tetap menjadi concern mengingat adanya berbagai prioritas pembangunan lainnya yang juga memerlukan pendanaan besar. Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi isu penting, di mana terdapat potensi kebocoran atau pemborosan anggaran akibat lemahnya sistem pengawasan, markup harga pengadaan, atau inefisiensi dalam rantai distribusi (Ritonga, 2023). Penelitian-penelitian terdahulu seperti (Merlinda & Yusuf, 2025) serta (Qomarrullah, 2025) lebih fokus pada dampak sosial dan kesehatan program namun belum mengkaji secara mendalam aspek efisiensi fiskal dan keberlanjutan pembiayaan dalam konteks keterbatasan sumber daya negara. Tantangan ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan perlunya diversifikasi sumber pendanaan melalui skema kemitraan dengan sektor swasta, kontribusi pemerintah daerah, atau mekanisme pembiayaan inovatif lainnya yang hingga saat ini belum dikembangkan secara optimal dalam struktur pembiayaan program.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan menghadapi kompleksitas permasalahan multidimensi yang saling berkaitan antara aspek infrastruktur, kelembagaan, kualitas pangan, sosial budaya, dan keberlanjutan pendanaan. Tantangan-tantangan ini tidak berdiri sendiri melainkan membentuk sistem permasalahan yang memerlukan pendekatan solusi terintegrasi dan adaptif sesuai dengan konteks lokal. Disparitas kapasitas antarwilayah menunjukkan perlunya strategi diferensiasi dalam implementasi program yang tidak menggunakan pendekatan one-size-fits-all, melainkan memberikan fleksibilitas dan dukungan yang lebih intensif kepada daerah-daerah dengan keterbatasan lebih besar. Penguatan sistem pengawasan kualitas dan keamanan pangan, investasi dalam infrastruktur dan kapasitas SDM, serta pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih efektif menjadi prasyarat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan program dapat mencapai tujuannya secara berkelanjutan.

### **Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Status Gizi dan Ketahanan Pangan Pelajar di Indonesia**

Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam meningkatkan status gizi pelajar dapat dievaluasi melalui beberapa indikator kunci yang mencerminkan perubahan kondisi kesehatan dan nutrisi anak usia sekolah (Maryani & Syahputra, 2025). Indikator utama yang menjadi target program adalah penurunan prevalensi stunting, pengurangan angka malnutrisi akut dan kronis, serta peningkatan status gizi berdasarkan indeks antropometri seperti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan indeks massa tubuh (Diniyuningrum, 2025) Sugianto & SKM, 2024). Data awal menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 masih berada di angka 19,8 persen atau setara dengan 4,482 juta balita, meskipun telah terjadi penurunan 1,7 persen dari tahun sebelumnya. Program MBG yang baru diluncurkan pada Januari 2025 belum memiliki data dampak jangka panjang yang terukur, namun proyeksi berdasarkan penelitian (Qomarrullah, 2025) menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi signifikan untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak sekolah dalam jangka waktu 3-5 tahun jika dilaksanakan secara konsisten dengan standar gizi yang tepat. Penelitian tersebut menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi secara teratur di sekolah dapat memenuhi sekitar 30-40 persen kebutuhan energi dan protein harian anak, yang sangat krusial terutama bagi anak dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami defisiensi gizi karena keterbatasan akses terhadap makanan bergizi di rumah.

Dampak program terhadap kehadiran dan partisipasi siswa di sekolah menjadi indikator efektivitas lain yang tidak kalah penting dalam konteks ketahanan pangan pelajar. Ketersediaan makanan bergizi gratis di sekolah telah terbukti menjadi insentif kuat bagi orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah secara konsisten, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di mana biaya untuk menyediakan bekal atau uang jajan menjadi beban ekonomi tersendiri. Penelitian (Merlinda & Yusuf, 2025) menemukan bahwa program makan bergizi tidak hanya meningkatkan motivasi belajar siswa setelah kebutuhan gizi terpenuhi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan angka putus sekolah karena faktor ekonomi. Data dari beberapa pilot project program di berbagai daerah menunjukkan adanya peningkatan rata-rata kehadiran siswa sebesar 15-20 persen setelah implementasi program, dengan peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada siswa dari keluarga kurang mampu dan daerah pedesaan. Efek positif ini tidak hanya bersifat kuantitatif dalam hal peningkatan angka kehadiran, tetapi juga kualitatif dalam hal konsentrasi belajar dan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa yang tidak mengalami kelaparan atau malnutrisi menunjukkan tingkat atensi dan daya serap materi pembelajaran yang lebih baik.

Efektivitas program dalam meningkatkan prestasi akademik siswa merupakan dampak jangka panjang yang memiliki korelasi kuat dengan perbaikan status gizi. (Qomarrullah, 2025) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa program MBG memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dalam jangka panjang melalui mekanisme perbaikan fungsi kognitif yang dipengaruhi oleh asupan gizi yang memadai. Nutrisi yang

cukup, terutama protein, zat besi, yodium, dan vitamin B kompleks, memiliki peran fundamental dalam perkembangan otak dan fungsi neurokognitif anak yang secara langsung mempengaruhi kemampuan belajar, daya ingat, dan pemecahan masalah. Studi longitudinal dari negara-negara yang telah menerapkan program school feeding dalam jangka panjang seperti Brasil dan India menunjukkan bahwa siswa yang menerima makanan bergizi secara konsisten di sekolah memiliki nilai ujian yang lebih tinggi dan tingkat kelulusan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dalam konteks Indonesia, meskipun data empiris mengenai dampak terhadap prestasi akademik masih terbatas mengingat program baru berjalan, proyeksi berdasarkan evidence dari program serupa di negara lain dan pilot project di beberapa daerah menunjukkan tren positif yang konsisten, terutama pada mata pelajaran yang memerlukan kemampuan kognitif tinggi seperti matematika dan sains.

Dimensi ketahanan pangan pelajar tidak hanya terbatas pada aspek ketersediaan makanan tetapi juga mencakup aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan pangan bagi anak usia sekolah. Program MBG berkontribusi signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas makanan bergizi bagi pelajar dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan makanan dengan kualitas gizi yang memadai. Dengan menjamin penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah, program ini menciptakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang melindungi anak-anak dari risiko kelaparan dan malnutrisi akibat ketidakstabilan ekonomi keluarga. Stabilitas pasokan makanan bergizi yang dijamin oleh program juga mengurangi fluktuasi asupan gizi harian siswa yang seringkali terjadi pada keluarga miskin akibat ketidakpastian pendapatan. Namun demikian, efektivitas program dalam dimensi ketahanan pangan ini sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program, di mana gangguan dalam distribusi makanan atau penurunan kualitas makanan yang disediakan dapat mengurangi dampak positif yang telah dicapai. (Fatimah et al., 2024) menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal kuantitas makanan tetapi juga kualitas, keragaman, dan kesesuaian dengan kebutuhan nutrisi spesifik kelompok sasaran, yang dalam konteks ini adalah anak usia sekolah yang memerlukan asupan gizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Dampak multiplier effect program terhadap perekonomian lokal menjadi dimensi tambahan yang memperkuat efektivitas program dalam konteks yang lebih luas. Keterlibatan petani lokal, UMKM, dan pelaku ekonomi kecil dalam rantai pasokan program menciptakan permintaan baru terhadap produk pangan lokal yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (Merlinda & Yusuf, 2025) mengidentifikasi bahwa program ini tidak hanya menyelesaikan masalah gizi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, yang menciptakan siklus positif di mana peningkatan ekonomi keluarga pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi di luar program. Data dari beberapa daerah implementasi menunjukkan adanya peningkatan omzet UMKM yang bermitra dengan program sebesar 30-50 persen, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dalam sektor pengolahan dan distribusi makanan. Dampak ekonomi ini juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di tingkat komunitas, yang secara tidak langsung meningkatkan ketahanan pangan di level rumah tangga dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Evaluasi terhadap kesesuaian antara desain kebijakan dengan realitas pelaksanaan menunjukkan adanya gap yang perlu dijembatani untuk meningkatkan efektivitas program. Desain kebijakan Program MBG secara teoretis telah mempertimbangkan berbagai aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan peningkatan gizi pelajar, termasuk standar gizi makanan, skema penyaluran yang fleksibel, dan mekanisme monitoring evaluasi (Rahmah et al., 2025). Namun dalam pelaksanaan di lapangan, berbagai tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas kelembagaan yang tidak merata, dan kendala distribusi di daerah terpencil menyebabkan realisasi program tidak selalu sesuai dengan desain awal. Penelitian-penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengkaji kesenjangan antara policy design dan implementation gap dalam konteks program MBG, namun pengalaman dari program serupa di negara lain menunjukkan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal dan kapasitas sistem untuk melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback dari lapangan. Dalam konteks Indonesia dengan keragaman geografis dan sosial ekonomi yang sangat tinggi, pendekatan implementasi yang differentiated dan context-specific menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai indikator efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan pelajar di Indonesia, dengan dampak yang bersifat multidimensi mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Evidence dari pilot project dan proyeksi berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan tren positif yang konsisten terhadap penurunan malnutrisi, peningkatan kehadiran sekolah, dan perbaikan prestasi akademik. Namun demikian, efektivitas program dalam jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kualitas makanan yang disediakan, dan kemampuan sistem untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi yang telah diidentifikasi. Untuk memaksimalkan efektivitas, diperlukan komitmen berkelanjutan dari semua stakeholder,

investasi dalam infrastruktur dan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang robust untuk memastikan program dapat mencapai tujuannya secara optimal dan berkelanjutan. Evaluasi dampak jangka panjang melalui studi longitudinal yang komprehensif juga diperlukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai kontribusi program terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah dirancang dengan mekanisme implementasi yang sistematis melalui tiga skema penyaluran fleksibel, koordinasi multistakeholder, dan sistem monitoring berjenjang yang berpotensi meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan pelajar secara signifikan. Namun, pelaksanaan program menghadapi tantangan multidimensi meliputi disparitas infrastruktur antarwilayah, keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, permasalahan kualitas dan keamanan pangan, serta resistensi sosial budaya terhadap menu tertentu yang memerlukan solusi adaptif dan kontekstual. Efektivitas program dalam menurunkan stunting, meningkatkan kehadiran siswa, dan memperbaiki prestasi akademik menunjukkan tren positif berdasarkan proyeksi dan pilot project, dengan dampak *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode literature review yang belum dapat mengukur dampak empiris langsung program mengingat pelaksanaan yang baru dimulai pada Januari 2025, serta terbatasnya data primer dari lapangan untuk memvalidasi efektivitas implementasi secara komprehensif di berbagai konteks geografis dan sosial ekonomi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi longitudinal dengan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan survei kuantitatif terhadap perubahan status gizi pelajar dan studi kualitatif mendalam mengenai dinamika implementasi di berbagai daerah, serta mengkaji secara spesifik mekanisme keberlanjutan pendanaan dan model kemitraan publik-swasta untuk memastikan kontinuitas program dalam jangka panjang.

#### Referensi

- Ababio, P. F., Taylor, K. D. A., Swainson, M., & Daramola, B. A. (2016). Impact of food hazards in school meals on students' health, academic work and finance—Senior High School students' report from Ashanti Region of Ghana. *Food Control*, 62, 56–62.
- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Jurnal Analisis Isi*.
- Aisyah, K. (2025). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menjamin Kehalalan pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Khaeruni. *Al Kabier Journal of Islamic Studies*, 3(1), 1–10.
- Alamsyah, A. H. A. R. P. R. (2022). *Gizi dan penanggulangan bencana* (M. K. Dr. Neila Sulung, S.Pd., Ns. (ed.)). Get Press Indonesia.
- Alderman, H., & Bundy, D. (2012). School feeding programs and development: are we framing the question correctly? *The World Bank Research Observer*, 27(2), 204–221.
- Amril, A., & Sazali, H. (2025). Formulasi Regulasi dan Kebijakan Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi pada Program Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1670–1679.
- Apriliyanti, I. R., Damayati, D. S., Andriani, L., Rizulloh, L., Fadlina, A., Razak, R., Yuanta, Y., Nugroho, N. K., Pambudi, B. I., & Apriani, A. N. A. A. (2025). *Penilaian Status Gizi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54.
- BPOM, R. I. (2022). Laporan Tahunan 2022. In *Jakarta: BPOM RI*.
- Bundy, D., Silva, N. de, Horton, S., Jamison, D. T., Patton, G. C., Schultz, L., Galloway, R., Bing Wu, K., Azzopardi, P., & Kennedy, E. (2018). Re-imagining school feeding: a high-return investment in human capital and local economies. *Elsevier*.
- Dewi, P. M., & SH, M. H. (2025). Metode Penelitian Kualitatif BAB. *Metode Penelitian Kualitatif*, 101.
- Dieu, H. J. De, Theogene, H., Emmanuel, N., Abdou, M., Emmanuel, N., & Ke, Z. (2023). School feeding programme implementation and its challenges in basic education schools in Rwanda. *African Educational Research Journal*, 11(3), 338–350. <https://doi.org/10.30918/AERJ.113.23.037>
- Dina, R. A. (2024). Strategi Pencegahan Food Waste di Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 6(4), 1069–1076.
- Diniyuningrum, A. (2025). Masalah Gizi Pada Anak. *Bookchapter Anak*.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21.
- Fauziah, I., & Krianto, T. (2022). Pengaruh budaya pangan lokal dalam pencegahan dan penanggulangan stunting pada anak balita (6-59 bulan): Systematic review. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6597–6607.
- Fauzie Rahman, S. K. M., Arifin, S., & Pd, M. (2024). *KINERJA TENAGA PELAKSANA GIZI: STRATEGI UNTUK*

- MENURUNKAN KASUS STUNTING*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hardiansyah, A., Hardiansyah, H., & Sukandar, D. (2017). Kesesuaian konsumsi pangan anak Indonesia dengan pedoman gizi seimbang. *Nutri-Sains: Jurnal Gizi, Pangan Dan Aplikasinya*, 1(2), 35.
- Haryanto, J. T. (2017). Desentralisasi fiskal seutuhnya. *Diperoleh Tanggal*, 20.
- Hidajah, A. C., Febriyanti, F., & Faisal, D. R. (2021). Faktor Risiko KLB Keracunan Makanan Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kesehatan*, 14(2), 65–70.
- Lendra, I Wayan, Daud, Y. F. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik. *Arus Jurnal Sosia Da Humaniora*, 5(1).
- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan pangan sebagai salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 57–72.
- Maryani, M., & Syahputra, B. A. (2025). Manajemen Pengambilan Keputusan Berbasis AHP-SAW dalam Evaluasi Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Pada Anak Usia Sekolah. *MBIA*, 24(2), 142–168.
- Mas'odi, M. P., Ardhan Zahroni, S. T., Suciati, S. S., Asrof, M. P., & Ribut Wahyu, E. (2024). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian: dari Teori hingga Aplikasi*. Penerbit Adab.
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373.
- Nasional, B. P. P. (2019). Pembangunan gizi di Indonesia. In *Jakarta: Direktorat Kesehatan Dan Gizi Masyarakat*. Direktorat Kesehatan.
- Natalia Desiani1, A. S. (2025). 2 1 -2. *Manuju Malayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48.
- Oktawila, D., Bagijo, H. E., & Tanudjaja, T. (2025). Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1595–1602.
- Qomarrullah, R. dkk. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan The Long-Term Impact Of The Free Nutritious Meal Program On Health And Educational Sustainability. *JOURNAL Of IntellectualPublication*, 5(2), 130–137.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Putri, E. (2025). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2855–2866.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Ritonga, D. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Medan Area.
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis : Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, 3(2), 131–143.
- Santoso, A., Melianawati, B. D., & Ayuningtyas, E. A. (2025). Governance Analysis Of The Implementation Of The Free Nutritious Meal Program. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 4(1), 240–270.
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323.
- Setyowati, L. A. (2025). Strategi Integratif untuk Menurunkan Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Indonesia: Pendekatan Berbasis Data Spasial dan Reformasi Kebijakan Pangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2888–2903.
- Soekarjo, D. D., Roshita, A., Thow, A.-M., Li, M., & Rah, J. H. (2018). Strengthening nutrition-specific policies for adolescents in Indonesia: a qualitative policy analysis. *Food and Nutrition Bulletin*, 39(3), 475–486.
- Suci Puteri Maulia, L. P. S. (2025). Jurnal basicedu. *Jurnal Basicedu*, 9(6), 1850–1855.
- Sugianto, M. A., & SKM, M. K. (2024). *Keberhasilan kebijakan percepatan penurunan stunting*. wawasan Ilmu.
- Sutrisno, A. D. (2022). Kebijakan sistem ketahanan pangan daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 28–42.
- Wulandari, A., Inggris, S., & Pamulang, U. (2025). Model Kyushoku Jepang dan Tantangan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 6948–6956.
- Ximenes, S. M. (2025). ASEAN Journal for Science School Feeding Program and Sustainable Development Goals ( SDGs ) in Education : Linking Food Security to Learning Outcomes in Timor-Leste. *Journal Homepage*, 4(2), 155–168.
- Zsidsisin, G. A., & Ritchie, B. (2009). Supply chain risk management—developments, issues and challenges. In *Supply chain risk: A handbook of assessment, management, and performance* (pp. 1–12). Springer.